



Sistem Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual 52 SKPD Tanda Tangan Kesepakatan

UMBULHARJO -- Guna mewujudkan pemerintahan yang akuntabel, Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta berkomitmen untuk mengimplementasikan Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual. Komitmen ini diwujudkan dalam penandatanganan surat kesepakatan oleh 52 SKPD yang dilaksanakan di Ruang Utama Atas, kompleks Balaikota, Rabu (7/10) pagi.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Yogyakarta, Titik Sulastri mengatakan, sebenarnya penerapan SAP berbasis akrual sudah diterapkan di lingkungan Pemkot Yogyakarta sejak tahun 2014. Hal itu terekam dari keberadaan Peraturan Walikota (Perwal) nomor 7 tahun 2014.

Meski demikian, penerapan sistem ini masih terus disempurnakan. Salah satunya

laporan tersebut. "Kepala harus mendampingi staf agar bisa mengetahui apa yang menjadi kendala dalam penyusunan laporan akuntansi untuk kemudian dikomunikasikan dan dicari solusinya," pesannya.

Kepala Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan (DPDPK) Kota Yogyakarta, Kadri Renggono mengungkapkan, pengimplementasian SAP berbasis akrual memang masih memiliki beberapa kelemahan, termasuk masih kurangnya dukungan dari Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat. Hal ini diindikasikan dengan masih ada catatan dari BPK untuk pelaksanaan SAP berbasis akrual. "Menurut temuan dari BPK, laporan keuangan kami masih belum sesuai dengan standar terkini, masih perlu banyak perbaikan untuk aspek legal dan teknis. Hal

dengan penandatanganan surat kesepakatan ini merupakan dokumen tertulis yang memuat komitmen setiap SKPD untuk menerapkan SAP berbasis akrual. "Pemkot sudah melangkah dan melakukan sosialisasi ke setiap SKPD, selanjutnya untuk penyempurnaan pelaksanaan akan dilaksanakan pelatihan dan review dari Inspektorat, optimalisasi SDM dari BKD, dan penganggaran sistem IT dari bagian TIT. Diharapkan di akhir tahun 2015, laporan pengelolaan berbasis akrual sudah bisa diserahkan semua SKPD," tambah Titik. Sementara itu, Asisten Administrasi Umum Sekda Kota Yogyakarta, Pontjosowi mengingatkan agar kepala SKPD tidak menyerahkan penyusunan laporan keuangan sepenuhnya ke stafnya. Namun juga harus secara aktif mendampingi staff yang bertugas menyusun

ini yang menjadi perhatian kami untuk bekerjasama dengan berbagai pihak agar laporan semakin optimal. SAP berbasis akrual ini memang lebih rumit jika dibandingkan kas, namun bisa dibilang hasilnya akan lebih akuntabel," tegasnya.

Walau masih memiliki kelemahan, namun penerapan SAP berbasis akrual di lingkungan Pemkot Yogyakarta dinilai sudah cukup baik. Saat ini ada tiga SKPD yang laporannya sudah cocok untuk Laporan keuangan (LK) SKPD penerimaan untuk Bulan September, yaitu Kantor Pengelola Taman Pintar, BPBD, dan Kecamatan Tegalrejo. Sementara untuk LK pengeluaran, ada 12 SKPD yang sudah cocok di sampai dengan bulan September dan 24 SKPD yang cocok untuk LK bulan Agustus. (qin)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pajak Daerah dan Pengelo	Positif	Biasa	Untuk Diketahui
2. Inspektorat			

Yogyakarta, 30 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005